

BAB 3

PENUTUP

3.3 Simpulan

Berdasarkan dari hasil pengamatan yang diperoleh selama kegiatan pelaksanaan praktik kerja lapangan pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara mengenai mekanisme pemungutan serta perlakuan akuntansi atas Pajak Kendaraan Bermotor. Maka dapat diambil simpulan bahwa UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara telah melaksanakan mekanisme pemungutan mulai dari proses pendaftaran, penetapan, pendataan, penagihan, dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan sebagaimana mestinya. Dalam proses-proses tersebut telah dilakukan dengan adanya bantuan dari petugas yang berwenang melalui kegiatan Dinas Luar (DL) maupun Operasi Gabungan secara rutin setiap bulan bekerja sama dengan PT. Jasa Raharja (Persero) dan Polisi Sektor setempat.

Selain itu, dalam proses pendataan dan penagihan mengenai surat-surat yang diberikan kepada Wajib Pajak seperti SPKPKB, SPSOPKB, NPP, NTP, SP1, SP2 dan Surat Paksa telah menggunakan aplikasi terkomputerisasi yang berupa Aplikasi SIAPP yang merupakan aplikasi yang dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut cukup penting jika dibandingkan dengan proses manual dalam menghemat waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan. Di samping itu juga untuk menghindari adanya manipulasi data, *human error*, atau kecurangan dalam memproses data Wajib Pajak.

Jumlah realisasi penerimaan kas dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2016-2018 selalu mengalami kenaikan dan selalu memberikan kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya. Hal ini mempengaruhi tingkat jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pembangunan-pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur dapat terealisasi dan berjalan dengan semestinya.

Akan tetapi, meskipun jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selalu mengalami kenaikan, masih banyak terdapat masyarakat yang kurang sadar dan kurang tanggung jawab akan kewajiban perpajakannya. Selain itu, masih banyak diantaranya yang memanfaatkan kegiatan pemutihan untuk melalukan pembayaran pajak agar terhindar dari biaya sanksi administrasi keterlambatan, yang padahal belum tentu setiap tahunnya Gubernur Jawa Timur akan mengeluarkan kebijakan pemutihan tersebut.

Efektivitas dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara tahun 2016 sampai dengan 2018 selalu mengalami peningkatan yang bersifat fluktuatif walaupun tidak terlalu signifikan perbedaannya, peningkatan selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 sebesar 104,00%, tahun 2017 sebesar 115,37% dan tahun 2018 sebesar 120,30% UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara telah berhasil melebihi indikator tingkat efektivitas yang tergolong sangat efektif.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil praktik kerja lapangan yang diperoleh, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan bagi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara adalah:

1. Mengoptimalkan kinerja para pegawai dan petugas yang bersangkutan dengan kewajiban di wilayah operasional UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara.
2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebaiknya lebih terbuka mengenai proses perhitungan, pertimbangan, dan penyetujuan target Pajak Kendaraan Bermotor yang diberikan kepada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara agar tidak terindikasi adanya *slack budget* dalam penerapannya secara internal.
3. Meningkatkan sosialisasi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) agar meningkatkan kesadaran Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak atas kendaraan bermotor yang dimiliki. Semakin terbuka dengan Wajib Pajak untuk mensosialisasikan prosedur-prosedur mulai dari pendaftaran hingga pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
4. Mempertahankan sistem informasi terkomputerisasi yang digunakan dalam pengolahan data perihal perpajakan, bila perlu selalu meng-*upgrade* sistem agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dalam melaksanakan tugas